

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

Muhammad Ilham Dharmawan  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## Abstrak

Kebijakan pengelolaan sampah merupakan upaya dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas berupa pelayanan serta pengelolaan pada sampah kepada masyarakat disetiap daerahnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pada impleentasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu, menganalisis faktor penghambat serta faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu. Metode penelilitan ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data pada peneliiian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dengan narasumber serta data sekunder diperoleh dari sumber lainnya. Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, diperoleh bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. terdapat kendala pada sumber daya yaitu sumber daya anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan pada terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia serta berdampak juga pada sumber daya manusia serta kesadaran akan kebersihan lingkungan pada masyarakat juga masih minim karena masih ditemukannya masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan dan sampahnya. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan sampah baik pada masyarakat serta kepada sekolah – sekolah serta meningkatkan anggaran untuk penyediaan fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah yang mendukung aktivitas pengelolaan sampah yang berbasis teknologi.

**Kata Kunci :** Implementasi, kebijakan, Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia dari tahun - ketahun terus mengalami pembangunan. Pembangunan negara ini bertujuan meningkatkan fasilitas dan untuk menunjang kebutuhan masyarakat negara. Negara memiliki prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Sasaran dari

Pembangunan Jangka Menengah ini yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia kepada arah yang lebih mandiri, adil maju serta makmur dengan cara melalui percepatan pembangunan diberbagai sektor bidang yang menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh serta didukung oleh bidang sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki daya saing.



volume sampah di TPA Kecamatan Cepu, Belum sebandingnya pada sarana dan prasarana yang tersedia, belum adanya Sanitary Landfill serta masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah secara mandiri (DLH Kabupaten Blora, 2023). Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti memiliki ketertarikan menggunakan judul **”Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe deskriptif kualitatif dengan cara melakukan data primer berupa wawancara dengan Tanya jawab kepada narasumber, dokumentasi berupa foto mengenai pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Cepu, observasi mengamati langsung terhadap objek yang diteliti serta data yang didapatkan dan dikumpulkan dengan baik berupa foto, dan dalam bentuk tulisan, serta data sekunder berupa studi literature berupa referensi dari buku, jurnal penelitian yang mampu mendukung penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan pada penelitian tentang Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu melihat dari fenomena dinataranya yaitu :

1. Analisis Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Tempat Pemrosesan Sementara yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Capaian dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu ini memiliki standar capaian yang berbeda dengan pengelolan sampah di Kecamatan lainnya di Kabupaten Blora. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Di Kecamatan Cepu dalam pengelolaan sampah ini standarnya yaitu selama sampah dari timbulan sampah baik rumah tangga maupun tempat lainnya serta sampah yang ada di TPS dapat berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir.

Kecamatan Cpeu juga melakukan penyediaan berupa fasilitas sampah seperti pengadaan sarana dan prasarana fasilitas. Namun jumlahnya secara kuantitas masih minim. Sementara aktor implementor ini sebagai aktor yang menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu ini berjalan dengan baik. respon aktor ini seperti informan 3 yang selalu memantau pengelolaan sampah setiap harinya di Kecamatan Cepu yang nantinya akan dilaporkan kepada Dinas Lignkungan Hidup pusat Kabupaten Blora untuk dapat dimonitoring dan di evaluasi. Selain itu dari pegawai pusat di Kabupaten Blora juga selalu

memantau selama 2 hingga 3x seminggu di Kecamatan Cepu untuk memantau memonitoring secara langsung keberlangsungan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu

## 2. Analisis Penyediaan Fasilitas

**Tabel 1.2.**

**Jumlah Kendaraan pengangkut Sampah di Kecamatan Cepu Tahun 2023**

No	Daerah	Tipe Kendaraan	Jumlah
1	Kecamatan Cepu pada Bidang Kebersihan	Viar Roda 3	2
		Dam Truck	1
		Arm Roll	2
2	Tempat Pembuangan Akhir Kecamatan Cepu	Viar Roda 3	1
		Bulldoser	1
3	<b>TOTAL</b>		7

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2023

Pada pelaksanaan di lapangan tentang sarana dan prasarana ini masih terbilang belum terpenuhi dengan baik. kelengkapan alat pada fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu dan di Tempat Pemrosesan Akhir Kecamatan Cepu ini masih terbilang belum cukup. Terbatasnya jumlah kuantitas pada ketersediaan alat berat untuk mengelola di TPA masih terbilang belum cukup seperti Bulldoser hanya 1 dan dam truck hanya berjumlah 1.

Sementara untuk fasilitas lainnya seperti penyediaan tempat sampah maupun TPS di Kecamatan Cepu

sendiri sudah terbilang cukup namun masih belum adanya kesadaran masyarakat sendiri mengenai kebersihan lingkungan. Untuk armada pengangkut sampah di Kecamatan Cepu masih terbilang minim sehingga ada beberapa sampah yang menumpuk lama karena menunggu turck pengangkut harus mengangkut sampah di beberapa tempat karena jumlahnya yang sedikit.

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih terbilang belum cukup untuk penyediaan fasilitas yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Karena untuk memiliki fasilitas berupa teknologi membutuhkan anggaran yang tinggi untuk pengadaannya serta untuk perawatan teknologi yang tidak murah.

## 3. Analisis Edukasi Terhadap Masyarakat.

Pemerintah kabupaten Blora dan Kecamatan Cepu serta Dinas Lingkungan Hidup berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan.

Dengan berupa edukasi sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dengan memberikan pengetahuan berupa regulasi yang berlaku tentang pengelolaan sampah dan edukasi tentang kesadaran kebersihan kepada

masyarakat. Selain dilakukannya sosialisasi ini pemerintah kabupaten Blora, Kecamatan Cepu dan juga Dinas Lingkungan Hidup Blora juga mengadakan acara berupa *world clean upDay* 2019 dengan mengajak berbagai lapisan masyarakat dan Dinas lainnya seperti polisi, Tentara maupun dinas lainnya.

#### 4. Analisis Penindakan Pelanggaran.

Pada implementasinya tentang penindakan sanksi ini telah berhasil dijalankan oleh pemerintah daerah setempat serta dinas lingkungan hidup Blora dengan hasil data sekunder bahwa pemerintah daerah beserta dinas lingkungan hidup Blora menindak oknum yang membuang sampah secara liar. Penindakan tersebut didapatkan hasil dari laporan beberapa masyarakat tentang oknum yang membuang sampah tersebut. Penindakan tersebut masih berupa sanksi namun juga sebagai pengingat kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah serta Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Blora serius dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora.

Pada implementasi Kebijakan pengelolaan sampah dalam keberhasilannya dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Mengambil dari teori Van Meter dan Van Horn diantaranya yaitu :

##### 1. Standart dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Blora dan Kecamatan Cepu telah memiliki standar operasional prosedur pengelolaan sampah sebagai implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam implementasinya pada pengelolaan sampah DLH memiliki standar dan sudah punya SOP untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu. Untuk TPA sendiri kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora memiliki perbedaan karena kecamatan Cepu masih menggunakan teknologi yang paling bawah.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan pada aspek sasaran ini pemerintah daerah Kecamatan Cepu serta Dinas Lingkungan Hidup memberlakukan kebijakan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Cepu. Pemerintah Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup memberikan fasilitas pengelolaan sampah berupa kendaraan serta sumber daya manusia sehingga masyarakat dimudahkan

dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta TPS.

## 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia pada berdasarkan kompetensinya Dinas Lingkungan Hidup dikerjakan oleh pegawai dengan kompeten serta berpendidikan minimal Sarjana S1 dan Diploma D3 pada beberapa bidang strategis di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

**Tabel 1.3.**

**Data Petugas Kebersihan dan  
Pengelolaan Sampah di Kecamatan  
Cepu Tahun 2023**

No	Bidang	Daerah	Jumlah
1	Subkooor Kebersihan	Kecamatan Cepu	32
2	Subkooor Pengelolaan Sampah	Kecamatan Cepu	7
3	Subkooor PB3LB3	Kecamatan Cepu	1
4	<b>Total</b>		<b>40</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tahun 2023.

Namun Sumber Daya Manusia terdapat kendala didalam ketersediaan jumlah kuantitas sumber daya manusia pada pekerja lapangannya. Yaitu minimnya jumlah petugas penyapu jalan di kecamatan Cepu yang berjumlah 32 orang. Sementara data yang dibutuhkan seharusnya yaitu sebanyak 108 orang.

Sehingga sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu dalam ketersediaan anggota pekerja lapangan terdapat kendala karena keterbatasan dalam jumlah kuantitas

petugas sehingga petugas diharuskan bekerja dua kali dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain itu Keterbatasan pada sarana dan prasarana disini menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah, seperti keterbatasan kendaraan pengangkut sampah. Sehingga beberapa daerah sulit untuk diakses oleh petugas sampah karena terbatasnya dalam segi kuantitas. Kelurahan maupun desa memiliki inisiatif untuk menyediakan alat kendaraan sendiri.

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan temuan penelitian terkait pada karakteristik organisasi pelaksana ini menunjukkan bahwa pola hubungan dalam organisasi ini memiliki hubungan yang baik dalam dinas lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cepu sebagai petugas lapangan di implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

Kesesuaian terhadap SOP dari dinas maupun organisasi ini akan menjadikan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik serta maksimal.

## 4. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana menunjukkan bahwa terdapat komitmen dari dinas

lingkungan hidup serta kecamatan Cepu dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu dengan melalui penyediaan fasilitas dari dinas lingkungan hidup, kecamatan cepu dan inisiatif dari desa serta kelurahan untuk menjangkau daerah lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah Daerah Kecamatan Cepu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan yang baik dengan menciptakan etos kerja yang baik dimana setiap petugas baik petugas kantor maupun petugas lapangan memiliki tanggung jawab dan kesadaran mengenai tugas pengelolaan sampahnya.

Selain itu pemerintah Kecamatan Cepu dan Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan respon setiap adanya permasalahan mengenai persampahan di tengah masyarakat dan mengajak masyarakat untuk sadar mengenai kebersihan lingkungan.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi ini seperti pemerintah Daerah Kecamatan Cepu dalam merespon dan menyelesaikan persoalan sampah di tengah masyarakat dimana adanya laporan dari masyarakat mengenai masalah sampah maka Kecamatan Cepu mengajak Dinas Lingkungan Hidup

untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara bersama.

Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat serta dinas lainnya untuk menjaga kebersihan berpartisipasi dalam kerja bakti tentang lingkungan dengan melalui surat edaran mengenai hari *world cleanup Day* dengan bersama dinas pemerintah Kecamatan Cepu dengan TNI, Satpol PP maupun polisi serta masyarakat.

Penjelasan diatas ini dapat diketahui bahwa hubungan antar organisasi di Kecamatan Cepu dengan dinas maupun lembaga terkait didalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Cepu sudah berjalan dengan baik.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa kondisi masyarakat masih ada beberapa yang kurang kesadaran mengenai kebersihan lingkungan selain itu masyarakat juga masih yang bergantung kepada pemerintah daerah maupun dinas terkait mengenai penyediaan fasilitas pengelolaan sampahnya.

Namun untuk kondisi ekonomi masyarakat sudah berjalan baik karena kebersihkn lingkungan untuk aktivitas perekonomian sudah berjalan dengan baik begitu juga dengan

kondisi politik yang berperan dalam kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat menjangkau pada seluruh masyarakat di Kecamatan Cepu.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemaparan terkait implementasi kebijakan Pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu didapatkan kesimpulan yaitu :

1. Timbulan Sampah dari Rumah Tangga dan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Petugas lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cepu melakukan pengurangan sampah dari timbulan sampah untuk dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir di Kecamatan Cepu. Hal tersebut sesuai dengan regulasi pada pasal 11 nomor 2 huruf a bahwa melakukan pengurangan sampah dari sumbernya.

2. Penyediaan Fasilitas.

Penyediaan fasilitas pada pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu ini pemerintah Kecamatan Cepu maupun Kelurahan dan Desa menyediakan fasilitas tersendiri untuk dapat mengelola sampah di daerahnya. Sehingga masih memanfaatkan inisiatif dari setiap pemerintahnya hal tersebut

disebabkan minimnya dari segi kuantitas sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

3. Edukasi terhadap Masyarakat

Pemerintah Daerah yaitu Kecamatan Cepu dan Kabupaten Blora bekerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Namun untuk Kecamatan Cepu sendiri masih ditemukannya masyarakat yang tidak sadar terkait kebersihan lingkungan sehingga masih adanya beberapa sampah yang dibuang dengan liar.

4. Penindakan Pelanggaran.

Dalam hal ini pemerintah daerah di Kabupaten Blora dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora melakukan tindakan untuk datang ke tempat oknum untuk memberikan edukasi terkait pelanggarannya. Sanksi tersebut diberikan kepada oknum sebagai bentuk hukuman atas perlakuan yang membuang sampah dengan sembarangan.

Faktor pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cepu

## 1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Dari pihak pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu memiliki SOP yang berbeda dengan kecamatan lainnya.

Sehingga Standar dalam pengelolaan sampah ini tidak adanya pemrosesan lainnya dan hanya sampah dari timbulan sampah rumah tangga maupun TPS dalam berakhir di Tempat Perosesan Akhir di Kecamatan Cepu dan pemilihan baik sampah organik maupun anorganik dan nantinya akan ditimbun.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu belum terpenuhi. Sumber daya manusia dalam hal ini pada implementasinya telah menjalankan dengan baik., namun hal ini masih menjadi faktor penghambat karena dalam segi kuantitas sumber daya manusia.

Pada bagian sumber daya sarana dan prasarana masih terbilang belum terpenuhi, hal tersebut karena fasilitas seperti kendaraan sampah masih tergolong kurang dalam kuantitasnya

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Orngaisasi pelaskana memiliki karakter dengan meciptakan pola hubungan didalam orngaisasi dengan pembagian tugas sesama petugas untuk

saling berkoordinasi. Sehingga hubungan antar aktor dalam implementasi ini dapat berjalan dengan baik serta dapat merespon cepat setiap kendala maupun permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu.

## 4. Sikap Para Pelaksana

Tanggung jawab dan kesadaran dari setiap aktornya telah dilaksanakan dengan baik serta selaras dalam faktor pendorong kebijakan. Pihak aktor implementasi kebijakan yang bertugas serta berperan didalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan samaph di kecamatna Cepu memiliki semangat kerja yang baik serta komitmen yang baik didalam menyelesaikan tugas.

## 5. Komunikasi Antar Organisasi

Kerjasama antara dinas terkait terhadap pemerintah daerah dan dinas lainnya serta kepada sesama petugas implementasi untuk tercapainya tujuan dan kesepakatan yang saling terlibat untuk tercapainya satu tujuan.

## 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Kondisi lingkungan ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan samaph di Kecamatan Cepu untuk dari sisi social ini masih belum tercapai dan menjadi faktor penghambat. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya

kebersihan lingkungan serta kesadaran terhadap sampah.

Masih ditemukannya sampah liar yang dibuang oleh masyarakat hal ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti minimnya kesadaran. Sementara faktor pendukung pada lingkungan ekonomi dan politik ini telah dilaksanakan dengan baik.

## SARAN

Dari kesimpulan diatas maka dapat didapatkan saran :

1. Perlu ditingkatkan lagi mengenai kesadaran mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat melalui sosialisasi tingkat kelurahan yang nantinya diteruskan kepada setiap RW dan RT. Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Pemerintah Daerah namun perlunya lebih ditingkatkan kembali mengenai sosialisasi edukasi kebersihan lingkungan serta sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah dan kesadaran pada anak sekolah melalui sekolah - sekolah.
2. Digiatkannya peran dan keikut sertaan masyarakat dalam aktivitas tentang kebersihan lingkungan sehingga dapat menambah kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan baik

di kecamatan Cepu maupun di daerahnya sendiri.

3. Memberikan *reward* kepada masyarakat yang menangkap oknum membuang sampah dengan sembarangan. Sehingga masyarakat akan terdorong untuk turut menjaga kebersihan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

bloranews. 2023. "DILARANG BUANG SAMPAH DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI PENGENDALI BANJIR." *Bloranews.Com*. Retrieved (<https://www.bloranews.com/dilarang-buang-sampah-di-sepanjang-aliran-sungai-pengendali-banjir/>).

dlhBlora. 2023. "Tinjau Lokasi TPS Yang Dilaporkan Bau Oleh Warga." *DLH Blora.Ig*. Retrieved ([https://www.instagram.com/p/CxH9v0yL9N1/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/CxH9v0yL9N1/?img_index=1)).

Pendim 0721/Blora. 2019. "DANRAMIL 05/CEPU DUKUNG ACARA KEGIATAN WORLD CLEANUP DAY." *Kodim0721blora.Com*. Retrieved (<https://kodim0721blora.com/2019/09/danramil-05cepu-dukung-acara-kegiatan-world-cleanup-day.html>).

Sahid, Abu. 2021. "Gerak Cepat, Tim DLH Dan Kelurahan Datangi Rumah Pelaku Pembuangan Sampah Liar." *Kapernews*. Retrieved (<https://www.kapernews.com/2021/11/11/gerak-cepat-tim-dlh-dan-kelurahan-datangi-rumah-pelaku-pembuangan-sampah-liar/>).

## Jurnal

Ahlheim, Michael. 2019. "WASTED! RESOURCE RECOVERY AND WASTE MANAGEMENT IN CUBA." *ACADEMIC ARTICLE*.

Danang Aji Kurniawan, Ahmad, and Zaenal Santoso. 2020. "PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH SEPATAN

KABUPATEN TANGERANG.” *ADI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 1:31–36.

Dewi Ariefahnoor, Nurul Hasanah, Adhi Surya. 2020. “PENGELOLAAN SAMPAH DESA GUDANG TENGAH MELALUI MANAJEMEN BANK SAMPAH.” *Jurnal Kacapuri* 1(1):14–30.

Halim, Lusiani Ferelia, and Didik Budi Fariadi. 2022. “Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Daur Ulang Pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ‘ Mulyoagung Bersatu ’ Kabupaten Malang.” 970(2009).

Huda, Rofi. 2018. “Manajemen Pengelolaan Sampah Studi Kasus Di Bank Sampah Tirtarona Tlogomas Kota Malang.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 3(2).

No, J. A. P. 2021. “Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang Di Kota Bekasi Parluhan Salomo Joyce Rares Very Londa.” VII(105):68–74.

Nurchahyo, Rianto. 2020. “Inovasi Alarm Dan Kedisiplinan Masyarakat Dalam Manajemen Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Perkotaan.” *Indonesian Journal OfCommunity Research and Engagement* 1(2):149–57. doi: 10.37680/amalee.v1i2.384.

Nurul Hikmah, Helena Losa Ruing. 2020. “Sosialisasi Pembuatan Bank Sampah Dan Pengelolaan Sampah Organik Serta Anorganik.” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1(2):90–95.

Prihatin, Rohani Budi. 2020. “Pengelolaan Sampah Di Kota Bertipe Sedang : Studi Kasus Di Kota Cirebon Dan Kota Surakarta.” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11(1):1–16. doi: 10.22212/aspirasi.v11i1.1505.

SHIMAMOTO, Kenichi. 2019. “DETERMINING FACTORS OF WASTE MANAGEMENT IN JAPAN.” *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management* 14(3):62–76.

#### **Buku**

Andy Fefta Wijaya, Ph.D , Oscar Radan Danar, M. A. 2017. *Manajemen Publik Teori Dan*

*Praktik*. Kedua. Universitas Brawijaya Press.

Dr. H. Amin Ibrahim, M. .. 2009. *Pokok - Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Kedua. edited by A. Gunarsa. PT Refika Aditama.

Dr. Harbani Pasolong, M. S. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Kedelapan. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Dr. Pandji Santosa, M. S. 2017. *Adminstrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Keempat. edited by Redaksi Refika. PT Refika Aditama.

Drs. Herabudin, M. Si. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah Filosofi Ke Implementasi*. Pertama. CV Pustaka Setia.

Hutomo, Prof. Dr. Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Keempat. Pustaka Pelajar.

Mpa, Drs. Miftah tHOHA. 1984. *Dimensi - Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. 2nd ed. CV. Rajawali Jakarta.

Mpa, Drs. Miftah tHOHA. 2003. *Dimensi - Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Prof. Dr. Yeremias T.Keban, SU MURP. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu Edisi Ketiga*. ketiga. PENERBIT GAVA MEDIA.

Sangkala, Prof. Dr. 2012. *Dimensi - Dimensi Manajemen Publik*. Penerbit Ombak.

Setyono, Budi. 2007. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*. Kalam Nusantara.

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Adminisrasi Publik Konsep Dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia*. Pertama. Graha Ilmu.

#### **Perundang – undangan**

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA